



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2014/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Ete Bin Pogili, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Watukila, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Salami Binti Sorupu, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Watukila, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah menilai bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha No. 0046/Pdt.P/2014/PA Una. tanggal 02 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Januari 1972 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Lasolo;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan dua orang saksi yang bernama Pak Abdul Halim dan Pak Abd Hamid dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 16.000,-(enam belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2014/PA Una hal 1 dari 10 halaman



- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 5 Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Para Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan tersebut tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut sementara para Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- 6 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Januari 1972;
- 7 Bahwa para Pemohon termasuk dalam golongan ekonomi lemah/tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Watukila, Nomor : 451/27/Dw/V/2014 yang diketahui oleh Camat Lasolo, oleh karena itu mohon kiranya para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1972 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama kecamatan Lasolo;
3. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaaha c.q Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam desa setempat bernama Awaluddin;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7409051411120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 14 Nopember 2012 atas nama Ete sebagai kepala keluarga;

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Samiruddin bin Sulaiman, umur 51 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1972 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Watukila (dahulu Desa Otele) Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sorupu.
 - Bahwa yang menikahkan adalah Ustas Awaluddin (imam desa setempat);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Pak Abdul Halim dan Pak Abd Hamid;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dalam pernikahannya;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2014/PA Una hal 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan karena pada saat itu belum ada kantor urusan agama sehingga tidak dicatatkan;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I suku Tolaki sedangkan Pemohon II suku Toraja;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan pihak lain;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini lebih 32 tahun hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan mereka;

2 Landoya bin Laposemba, umur 51 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1972 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Watukila (dahulu Desa Otele) Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sorupu.
- Bahwa yang menikahkan adalah Ustas Awaluddin (imam desa setempat);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Pak Abdul Halim dan Pak Abd Hamid;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dalam pernikahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan karena pada saat itu belum ada kantor urusan agama sehingga tidak dicatatkan;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I suku Tolaki sedangkan Pemohon II suku Toraja;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan pihak lain;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini lebih 32 tahun hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I untuk disahkan nikahnya dengan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2014/PA Una hal 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kecamatan Lasolo, pada tanggal 10 Januari 1972 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sorupu, dihadapan dua orang saksi bernama Pak Abdul Halim dan Pak Abd Hamid, dengan mahar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), dan pernikahan tersebut tidak ada larangan perkawinan menurut agama serta tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada istri Pemohon I yang lain selain Pemohon II sendiri serta tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan tersebut, setelah menikah dahulu Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan surat nikah karena saat itu belum ada pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, adalah apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam pada tanggal 10 Januari 1972 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Lasolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan Syariat Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P berupa fotokopi kartu keluarga yang oleh dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian Hakim perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Samiruddin bin Sulaiman dan Landoya bin Laposemba;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tahun 1972 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Watukila Kecamatan Lasolo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sorupu namun diwakilkan kepada imam desa setempat bernama Awaluddin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan saksi nikah masing-masing bernama Pak Abdul Halim dan Pak Abd Hamid;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama kurang lebih 32 tahun tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2014/PA Una hal 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Januari 1972 di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- 2 Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sorupu, dan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Awaluddin dan saksi nikah Pak Abdul Halim dan Pak Abd Hamid, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
- 3 Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
- 4 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan, sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 Rbg dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor: 0046/Pdt.P/2014/PA Una tanggal 03 Juni 2014 maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2014/PA Una hal 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Ete Bin Pogili dengan Salami Binti Sorupu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1972 di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- 3 Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Lasolo, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Laila Syahidan, S.Ag sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim
TTD
Laila Syahidan, S.Ag

Panitera Pengganti
TTD
Dra. Faryati Yaddi, M.H

Perincian Biaya Perkara

	:	
1 Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
2 Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp	0,-
3 Biaya Panggilan	: Rp	0,-
4 Redaksi	: Rp	0,-
5 <u>Meterai</u>	: Rp	0,-

Jumlah : Rp 0,-
(nol rupiah)

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya
Panitera

TTD
H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H